



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : ANGGOTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ADRIANUS ELIASTA MELIALA**
2. Jabatan : **ANGGOTA OMBUDSMAN RI**
3. NHK : **173566**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.840.593.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m<sup>2</sup>/400 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 431.752.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/83 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 161.705.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 90.816.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m<sup>2</sup>/63 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.017.000.000
5. Tanah Seluas 135 m<sup>2</sup> di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.  
139.320.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 1.098.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
390.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
518.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
190.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 607.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 20.310.000**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. 650.716.000**



Sub Total	Rp.	4.216.619.000
III. HUTANG	Rp.	348.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.868.619.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.